

SKRIPSI

**EVEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENANGANANAN FAKIR MISKIN PADA KANTOR
DINAS SOSIAL KABUPATEN DOMPU**

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)**



OLEH

DIRMANSYAH
NIM. 218110080

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**EVEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA KANTOR
DINAS SOSIAL KABUPATEN DOMPU**

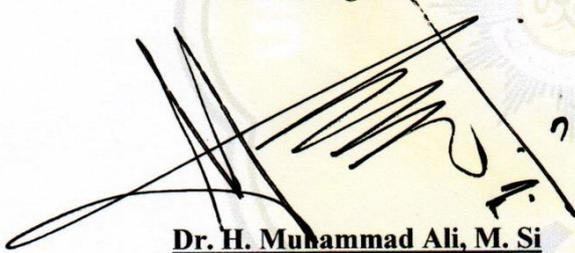
Skripsi ini telah memenuhi syarat dan disetujui oleh pembimbing untuk
diajukan ke sidang ujian skripsi pada :

Hari : Senin

Tanggal : 9 Januari 2023

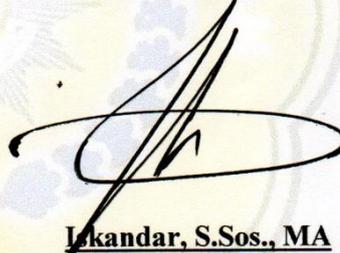
Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Ali, M. Si
NIDN. 0806066801

Pembimbing II



Iskandar, S.Sos., MA
NIDN. 0802048904

Mengetahui

Ketua Prodi Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP
NIDN. 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN

EVEKTIFITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA KANTOR DINAS SOSIAL KABUPATEN DOMPU

Oleh ;

DIRMANSYAH
NIM.218110080

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 9 Januari 2023
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Dr. H. Muhammad Ali, M. Si**
NIDN.0806066801



()

Ketua

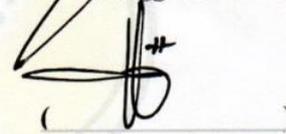
2. **Iskandar, Sos., MA**
NIDN. 0802048904



()

Anggota

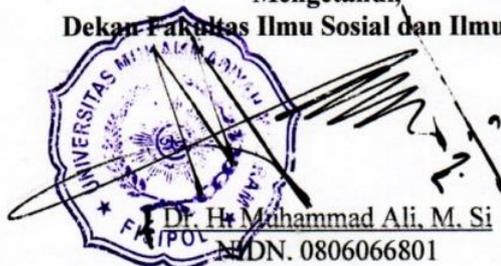
3. **Drs. Amil, MM**
NIDN. 0831126204



()

Anggota

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Muhammad Ali, M. Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magesterdan Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri,tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sangsi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya ini, serta sangsi lainnya sesasi dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, 18 Januari 2023
Penyusun,



DIRMANSYAH
NIM. 218110080



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIRMANSYAH
 NIM : 218110080
 Tempat/Tgl Lahir : 18-03-1999
 Program Studi : Administrasi Publik
 Fakultas : FiKPOL
 No. Hp : 085932678764
 Email : dirmansyahresna@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam
penanganan fakir miskin pada kantor,
DiDas Sosial Kabupaten Dompu

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 33%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 18-01-.....2023
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



DIRMANSYAH
 NIM. 218110080

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIRMANSYAH
 NIM : 218111080
 Tempat/Tgl Lahir : 18-03-1999
 Program Studi : Administrasi Publik
 Fakultas : Fiq Pol
 No. Hp/Email : 085932678764
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam
penanganan fakir miskin pada kantor Dinas Sosial
Kabupaten Dompu.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 18-01-.....2023
Penulis



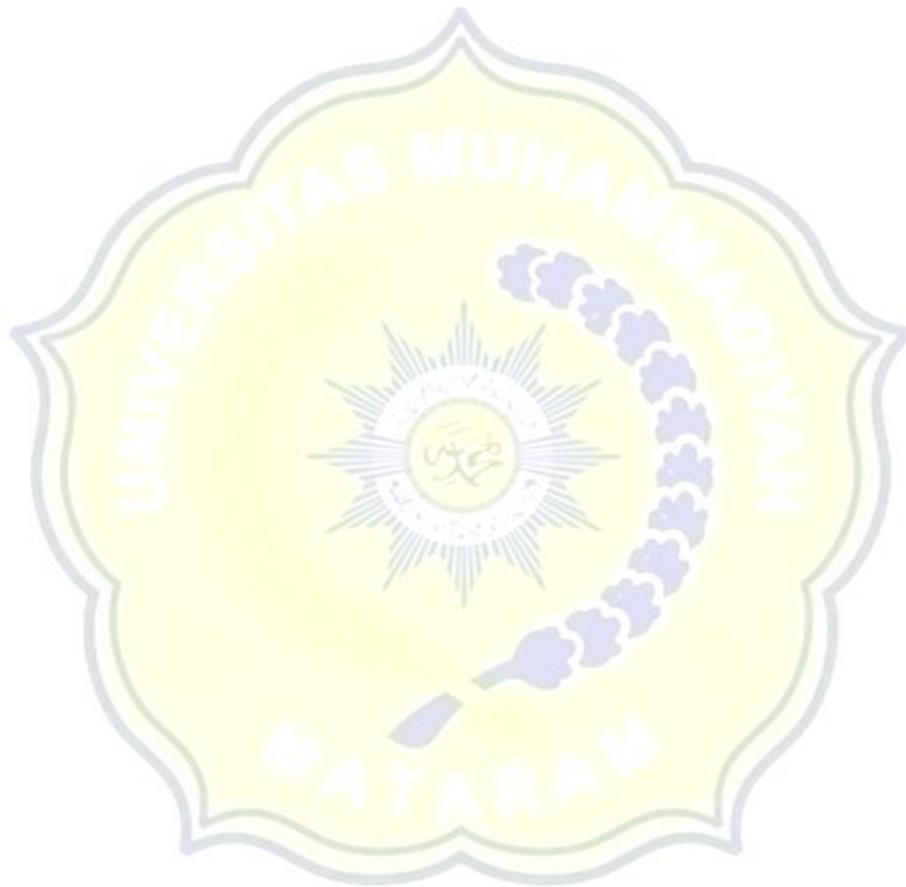
DIRMANSYAH
NIM. 218110080

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Askandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Tidak ada jalan mudah menuju kebebasan, dan banyak dari kita akan harus melewati lembah gelap menyeramkan. Lagi dan lagi sebelum akhirnya kita meraih puncak kebahagiaan.



KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur hanya milik Allah SWT karena atas izin dan kehendakNya, penulis dapat menyelesaikan Proposal Penelitian yang berjudul **"Efektifitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penanganan Fakir Miskin pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Dompu"** yang dapat penulis rampungkan tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

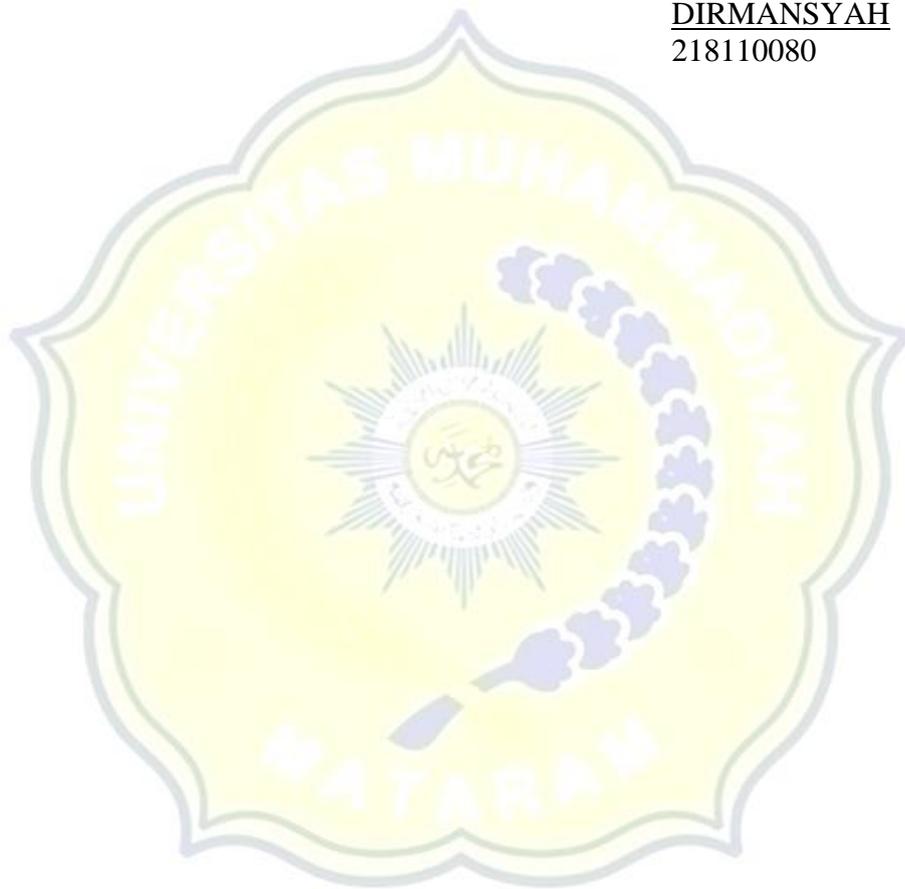
1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmat Hidayat, S.AP., M.AP. Selaku Ketua Program Studi Administrasi Pablik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bunda Mardiah, M. Si Selaku pembimbing I dan Bapak Iskandar, S. Sos., MA. selaku pembimbing II yang telah memperkenankan waktu dan ilmunya untuk mengarahkan dan memotivasi penulis.
5. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Administrasi Pablik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Semua pihak yang telah mendukung Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya dan membalas semua amal kebaikan mereka. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir

kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Mataram, 13 Juni 2022

DIRMANSYAH
218110080



**EVEKTIVITAS KINERJAPEMERINTAH DAERAH DALAM
PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA KANTOR DINAS SOSIAL
KABUPATEN DOMPU**

**Muhammad Ali¹, Iskandar², Dirmansyah³,
Pembimbing¹, Pembimbing², Mahasiwa³**

**Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**

ABSTRAK

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Dompu sangat berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan, Dimana dalam penanganan fakir miskin dan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, bidang penanganan fakir miskin sebagai sub bagian di Dinas Sosial Kabupaten Dompu dalam menangani hal tersebut, merencanakan program pemberdayaan fakir miskin adalah salah satu penanggulangan atau bantuan dari pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Sosial dalam penanggulangan fakir miskin di kabupaten Dompu dengan menggunakan empat indikator kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto,(2011), yaitu kualitas layanan, Efektivitas, Responsivivilitas dan Akuntabilitas. Metode penelitian ini yaitu dengan cara deskriptif, kualitatif dengan fokus penelitian bertempat di Dinas Sosial Kabuapten Dompu. Untuk jenis pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan hasil penelitian dapat diketahui Dinas Sosial dalam penanggulangan Fakir Miskin di Kabupaten Dompu dinilai telah menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terlaksananya keempat indikator dari penelitian kinerja yaitu: kualitas layanan, efektivitas, respontabilitas dan akuntabilitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Sosial dalam Penanggulangan Fakir Miskin di Kabupaten Dompu melalui Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan dengan baik ditandai dengan berkurangnya jumlah keluarga penerima bantuan disetiap tahun.

Kata Kunci Kinerja, Dinas Sosial, Penanggulangan Fakir Miskin.

**EFFECTIVENESS OF LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE IN
HANDLING THE POOR AT THE DOMPU DISTRICT SOCIAL SERVICES
OFFICE**

Muhammad Ali¹, Iskandar², Dirmansyah³,
First Consultant¹, Second Consultant², Student³
Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences,
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

The Dompu Regency Social Service Office is crucial to reducing poverty. The field of addressing the poor is a division of the Dompu Regency Social Service, which is concerned with eradicating poverty. Planning a poverty empowerment program is one of the countermeasures or forms of government support in dealing with this. Through the four performance measures of service quality, effectiveness, responsiveness, and accountability given by Dwiyanto (2011), this study seeks to ascertain how the Social Service performs in combating poverty in the Dompu district. With a focus on the Dompu District Social Service, this research technique is descriptive and qualitative. The sort of data is collected through interviews, observation, and documentation. The study's findings demonstrate that the Dompu Regency's Social Service has performed its duty correctly. It can be seen from implementing the four performance research indicators: service quality, effectiveness, responsibility and accountability. The results of this study indicate that the performance of the Social Service in Overcoming the Poor in Dompu Regency through the Family Hope Program (PKH) has been going well, marked by the reduced number of families receiving assistance each year.

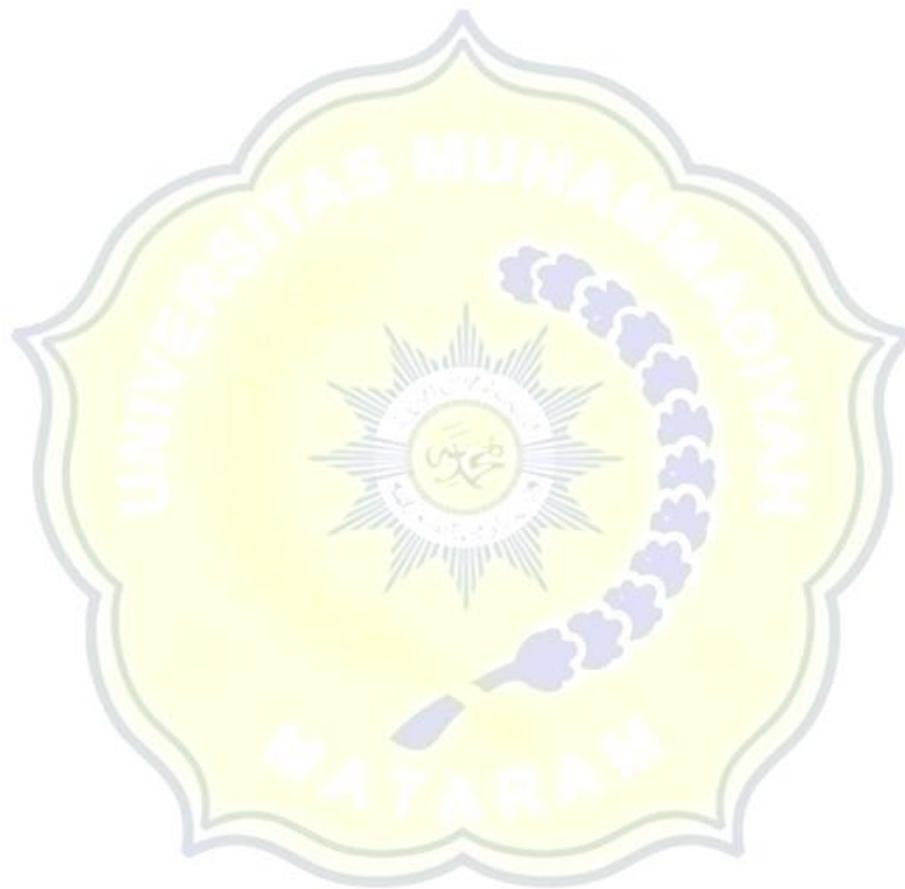
Keywords: Social Services, Poor Management.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Tinjauan Teori	13
2.2.1. Pengertian Efektifitas	13
2.2.2. Pengertian Kinerja	18
2.2.3. Pengertian Fakir Miskin	20
2.2.4. Efektifitas Penanganan Fakir Miskin menurut Undang-Undang 1945	22
2.2.5. Peran Pemerintah	23
2.3. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Pendekatan Penelitian	26
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian	26
3.3. Jenis dan Sumber Data	27
3.4. Teknik Pengumpulan Data	28
3.5. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.1.1. Gambaran Umum Kantor Dinas Sosial Kabupaten Dompu	33
4.1.2. Visi dan Misi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Dompu	34
4.1.3. Struktur Organisasi.....	35
4.1.4. Rekapitan Data Penanganan Kasus	37
4.2. Hasil Penelitian	41
4.2.1. Efektivitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Dompu	41
4.2.2. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Dompu	44
4.2.3. Berdasarkan data penerima PKH di Kabupaten Dompu pada tahun 2022	46
4.2.4. Efektivitas	49
4.2.5. Responsivitas.....	50
4.2.6. Akuntabilitas	52

BAB V_KESIMPULAN DAN SARAN	54
5.1. Kesimpulan.....	54
5.2. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sejumlah variabel pendukung diperlukan agar rakyat mampu berperan dalam menjaga pemerintahan yang ada agar suatu pemikiran yang dimotori sebagai gagasan demokrasi memiliki peluang untuk berhasil. Sebagai makhluk sosial, tidak menguntungkan baginya untuk duduk diam sementara semua keputusan mengenai masyarakat dibuat oleh otoritas yang tidak berusaha untuk mengontrol atau mengarahkan mereka, seperti diketahui, partisipasi aktif dalam hal-hal yang dikoreksi oleh ekstensi yang beradab. Duduk diam sementara semua keputusan mengenai masyarakat dibuat oleh otoritas yang tidak berusaha untuk mengontrol atau mengarahkan mereka tidak menguntungkan baginya. Faktor terpenting dalam pembentukan kepribadiannya adalah pengaruh masyarakat atau negara.

Ini adalah salah satu tujuan dari gerakan reformasi, seiring dengan tumbuhnya demokrasi, yang menuntut dalam praktik dan sosial mengikuti kediktatoran Orde Baru, dan itu adalah salah satu tujuan dari gerakan tersebut. Selain tuntutan tersebut, ada gugatan yang diajukan terhadap tuntutan kesejahteraan rakyat sebagai kegiatan yang penting bagi prinsip demokrasi (Muljarto, 2012: 22). Karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini yang semakin beragam, diperlukan model mental atau cara pandang yang berbeda. Gagasan pemerintahan yang demokratis mensyaratkan bahwa anggota masyarakat mengambil bagian aktif dalam proses pengambilan

keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan umum masyarakat. Konsep perlindungan dan hak asasi manusia di Dompu belum disesuaikan dengan apa yang telah diatur oleh aturan pemerintah Dompu yang tertuang dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2016 tentang Penanganan Fakir Miskin. Hal ini karena penanganan fakir miskin didasarkan pada cita-cita Pancasila.

Agus Dwiyanto (2011:25), Sedangkan kelas menengah ke bawah mempengaruhi kenaikan harga pangan, pengaruh masyarakat di kalangan petani didorong oleh penyebaran isu-isu positif di kalangan pelaku bisnis, yang merangsang ekonomi sehingga tidak terjadi pergolakan politik. Kehidupan bernegara saat ini masih diselimuti gemuruh suasana demokrasi untuk menentukan siapa yang menentukan sebagai calon pemimpin bangsa. menghasilkan kekerasan untuk mencapai dampak yang diinginkan pada masyarakat, yaitu peningkatan jumlah uang yang diinvestasikan oleh individu.

Karena pembangunan perkotaan sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sehingga menimbulkan angka kriminalitas dan keberhasilan percepatan pembangunan di perkotaan. Di sisi lain, keterlambatan pembangunan di pedesaan mengundang migrasi desa-ke-kota yang antara lain mengakibatkan bertambahnya penduduk perkotaan yang berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran di perkotaan. Pertumbuhan merupakan salah satu dampak negatif pembangunan karena pembangunan perkotaan sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sehingga menimbulkan angka kriminalitas dan keberhasilan

pembangunan. mencari pekerjaan di wilayah metropolitan (Agus Dwiyanto, 2011:14).

Strategi kebijakan pembangunan ekonomi nasional jangka pendek perlu disusun jika ingin mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, mencapai kesatuan visi dan misi bangsa masa kini dan masa depan, serta menyusun strategi kebijakan jangka pendek. istilah pembangunan ekonomi nasional. Hal ini dapat berdampak pada pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Di sisi lain, dalam kehidupan perkotaan terjadi kesenjangan kehidupan yang sangat menakutkan dengan maraknya kehidupan masyarakat miskin, kemacetan lalu lintas yang tidak memperhatikan keselamatan masyarakat di dalamnya. Disparitas pertumbuhan fisik yang sangat mencolok yang tidak diimbangi dengan perkembangan moral negara akan mengakibatkan kerugian mendasar bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal ini dikarenakan kedua aspek pembangunan tersebut tidak saling melengkapi satu sama lain. Untuk mengangkat citra negara di dunia internasional, pendidikan lintas sektor harus diperkuat. Hal ini diperlukan untuk menyampaikan pesan bahwa kemajuan suatu bangsa ditandai dengan kepedulian masyarakat terhadap kehidupan kaum miskin yang setiap hari semakin meningka (Sarlito Wirawan Sarwono, 2005: 49).

Sejalan dengan pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan negara republik indonesia adalah melindungi segenap bangsa indonesia yang kemudian diturunkan dalam undang-undang dasar negara republik indonesia dalam

pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebut kan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh negara, tetapi pada kenyataannya yang ada dilapangan bahwa tidak semua orang miskin yang bergantung pada penghasilan dijalanan merupakan masalah yang harus dihadapi semua pihak, bukan hanya orang tua atau keluarga saja, tetapi juga setiap orang yang berada dekat anak tersebut harus dapat dibantu pertumbuhan anak dengan baik.

Menurut Maghfur, (2010), Saat ini masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan yang harus mendapatkan bantuan atau perhatian dari pemerintah; meskipun demikian, banyak dari orang-orang ini terlihat hidup di jalanan. Misalnya, jumlah anak yang hidup di jalanan tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Banyak hal yang menjadi faktor pendorong atau penarik seseorang untuk terlibat, dan salah satunya adalah masalah kemiskinan, belum lagi masalah orang yang dianggap miskin tetapi mencari nafkah di jalanan.

Fenomena meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis sebenarnya telah menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat pengguna jalan sejak lama. Hampir di setiap jalanan selalu kita jumpai gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang memberikan citra buruk, selalu merusak keindahan, dan cenderung meningkat dengan berbagai fenomena sosial tertentu, baik yang bersumber dari masyarakat maupun akibat pengaruh globalisasi, industrialisasi, dan pesatnya arus informasi dan urbanisasi.

Masalah mereka yang hidup dalam kemiskinan terkait erat dengan meningkatnya migrasi orang dari daerah pedesaan ke pusat-pusat metropolitan di seluruh dunia. Menurut Dwiyanto (2011), munculnya fakir miskin dan pengemis erat kaitannya dengan faktor kemiskinan, ketidakharmonisan keluarga, serta kemalasan bekerja dan tidak bertanggung jawabnya orang tua terhadap keluarganya. Selain itu, Dwiyanto (2011) menyatakan bahwa munculnya fakir miskin dan pengemis erat kaitannya dengan faktor ketidakharmonisan keluarga. Faktor terbesar peningkatan jumlah individu yang hidup dalam kemiskinan adalah jumlah anak yang terlantar atau tanpa orang tua. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, Dinas Sosial Kabupaten Dompu telah melakukan sejumlah reformasi.

Tabel 1.1
Jumlah Fakir Miskin Kabupaten Dompu

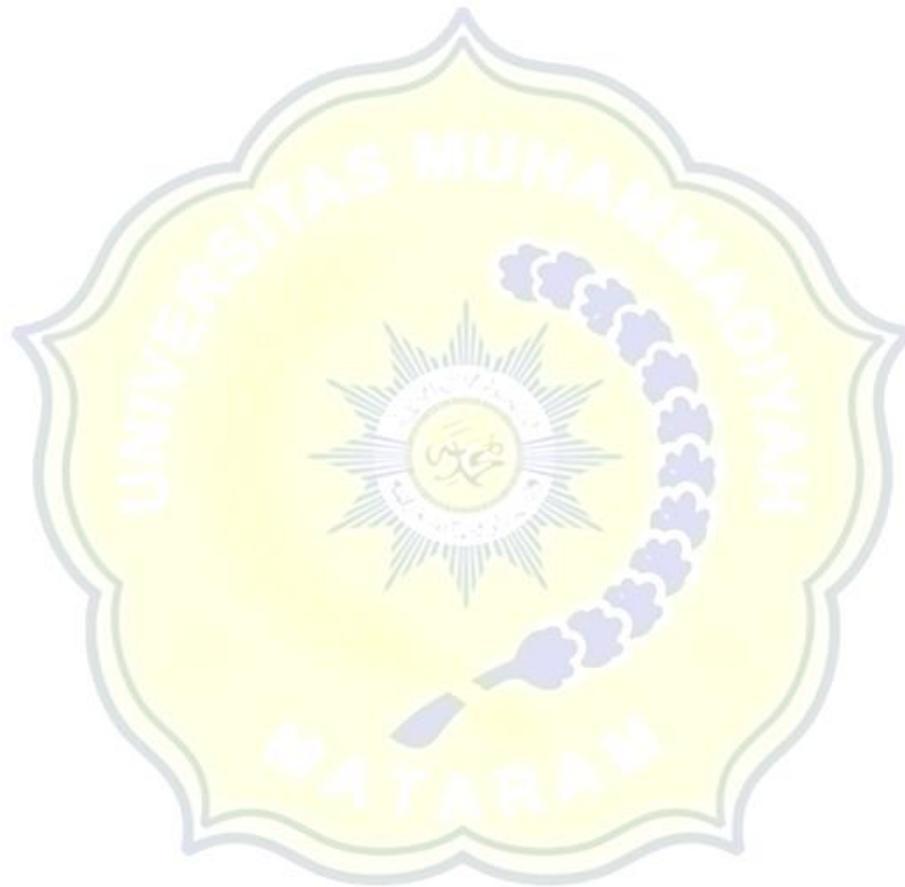
Tahun	Jumlah Fakir Miskin
2019	529
2020	492
2021	467

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Dompu

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu jumlah penduduk miskin dapat dikatakan meningkat dengan pesat dalam kurun waktu 2019-2021, yang mana pada tahun 2019 merupakan jumlah penduduk terkecil dengan status masyarakat miskin dan menjadi 467 pada tahun 2021. Peningkatan yang sangat drastis terjadi pada

tahun 2019 dan pada tahun berikutnya menurun secara perlahan hingga tahun 2021 dengan jumlah 467 orang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk penulisan poposal yang berjudul **“Efektifitas Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Fakir Miskin Pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Dompu”**.



1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Desa Saneo?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Menghambat Eektivitas Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial Di Desa Saneo?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Dompu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektivitas penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial Kabupaten Dompu.

1.4.Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - a. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk menerima gelar sarjana strata 1 (S.AP) Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram.
 - b. Memperoleh tambahan pengetahuan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi, kecerdasan intelektual dan emosional,

dan memperoleh kesempatan untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh diperguruan.

- c. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai Efektifitas Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Fakir Miskin Pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Dompu

2. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram Khususnya jurusan Administrasi Publik yang selanjutnya untuk disajikan sebagai bahan informasi untuk penelitian di masa mendatang.

3. Bagi Perusahaan

Hasil Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen dalam memilih kebijakan ataupun keputusan di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah uraian temuan penelitian terdahulu (penelitian lain) yang relevan dengan penelitian sekarang tentang komponen subjek atau masalah yang diteliti. Peneliti mengidentifikasi berbagai penelitian yang masih relevan dengan penelitian ini namun mengalami perubahan dari penelitian ini berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan untuk penelitian ini..

1. Arifiana Ningsih (2011), “Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM)”.

Metode penelitian yang dapat mengkarakterisasi efektivitas Bakti Sosial dalam kaitannya dengan KUBE, dipilihlah teknik deskriptif kualitatif sebagai pendekatan penelitian yang tepat. Metode pemilihan yang digunakan disebut purposive sampling, dan itu terdiri dari pengambilan sampel dari individu yang dianggap memiliki pemahaman yang komprehensif tentang masalah tersebut. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber atau informan, dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, keduanya termasuk dalam sumber data yang digunakan. Wawancara dan dokumentasi merupakan metode utama yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Untuk memverifikasi keakuratan data, kami menggunakan proses yang dikenal sebagai triangulasi data, termasuk

membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif yang dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu mereduksi jumlah data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dari data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sragen telah cukup berhasil menciptakan KUBE secara keseluruhan, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan.

2. Feni Hafiza (2020), “Efektivitas Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Terkait Penanganan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”.

Adapun penulisan skripsi ini berlatar belakang banyak anak muda yang hidup di jalanan kota Pekanbaru. Kebalikan dari apa yang seharusnya dilakukan anak-anak, yaitu tumbuh dengan kehidupan normal dan mengenyam pendidikan, mereka menghabiskan waktunya di jalanan. Peraturan pelarangan kegiatan di jalan-jalan Pekanbaru yang dianggap meresahkan masyarakat dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Penulis skripsi ini mengemukakan beberapa poin penting selama penulisannya. Diantaranya adalah: peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru; Efektifitas penanganan penurunan jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru; dan Kajian Fiqh Siyasah tentang Penanganan Anak Jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini dikenal dengan penelitian sosiologi hukum, dan menggunakan metodologi penelitian lapangan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Observasi dan wawancara digunakan dalam penelitian ini

untuk memperoleh data primer dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Metode-metode ini berfungsi sebagai teknik pengumpulan data untuk studi khusus ini. Data sekunder, di sisi lain, adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber seperti buku dan bahan lain yang relevan langsung dengan masalah yang sedang diselidiki. Setelah data terkumpul, dievaluasi dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Penulis mengulas pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan teks-teks al-Qur'an, hadits, dan prinsip-prinsip fiqhiyah untuk memperkuat kesimpulan yang ditarik dari temuan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan. Setelah mengetahui permasalahan yang ada, penulis memperoleh hasil melalui wawancara dan observasi lapangan.

3. Yuyun Yuliana (2022), "Efektivitas Kinerja Pegawai Sub Bagian Penanganan Fakir Miskin Dalam Bantuan Hibah Kube Di Dinas Sosial Provinsi NTB".

Provinsi NTB sangat berperan yang sangat penting dalam perang melawan kemiskinan dan dalam perawatan yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, bidang perawatan yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan ditangani oleh subbagian Dinas Sosial Provinsi NTB. Subbagian ini bertanggung jawab merencanakan program-program pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan memberikan hibah kelompok kepada Usaha Bersama (KUBE) untuk fakir miskin (FM). (1) apakah program hibah FM di Provinsi NTB telah berhasil sampai saat ini, serta isu-isu yang muncul, tujuan dari

penelitian ini adalah untuk menyelidiki pertanyaan-pertanyaan tersebut.

(3) apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh pegawai sub bagian Tata Kelola Miskin dalam penanganan bantuan hibah KUBE FM di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat; (2) efektifitas kinerja Sudin Penanggulangan Fakir Miskin di Dinas Sosial Provinsi NTB dalam melaksanakan program Hibah Kube; dan (4) apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami pegawai sub bagian Tata Kelola Miskin dalam menangani program Hibah Kube; Jenis penelitian yang digunakan dikenal dengan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini memanfaatkan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi dari berbagai informan. Peneliti juga menggunakan teknik analisis data seperti menyunting data, melakukan reduksi data, mengkategorikan unit-unit yang melibatkan sumber informan, menginterpretasikan data, dan menguji keabsahan data. Pegawai bidang penanganan fakir miskin di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dikatakan efektif dalam menangani bantuan hibah KUBE, menurut temuan penelitian. Hal ini terlihat dari beberapa indikator antara lain hasil kerja, perilaku, atribut dan komparatif atau pengetahuan dan wawasan terkait KUBE yang mereka kuasai. Akibatnya, mereka mampu menggambarkan dan menjelaskan kepada masyarakat seberapa baik pekerjaan mereka dilakukan. Selain itu, terdapat aspek pendukung seperti data lengkap penduduk Kabupaten Dompu, kondisi masyarakat yang tidak terlibat dalam proses pertemuan, pembinaan, dan pendampingan..

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1. Pengertian Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* ini menunjukkan sesuatu telah dilakukan dengan baik atau sesuatu telah berhasil. Khasiat didefinisikan sebagai ketepatan penggunaan, keefektifan, atau dukungan terhadap suatu tujuan dalam leksikon ilmiah populer.

Spesialis yang berbeda, berdasarkan metodologi yang mereka gunakan, masing-masing akan memiliki cara unik mereka sendiri untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan efektivitas. Menurut berbagai ahli, berikut beberapa definisi efektivitas sekaligus kriteria penentuan efisiensi organisasi:

1. Efektifitas, menurut Drucker, diartikan sebagai melakukan apa yang benar (*doing the right things*).
2. Chung dan Megginson mendeskripsikan efikasi sebagai ekspresi yang dapat direpresentasikan dalam berbagai cara oleh banyak individu. Namun menurut Chung dan Megginson, yang dimaksud dengan efektifitas bukan hanya keterampilan atau tingkat pencapaian tujuan, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sedemikian rupa sehingga organisasi dapat terus eksis (*hidup*).
3. Pengertian efektivitas dalam pandangan Arens dan Lorlbecke, sebagaimana diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, adalah sebagai berikut: “Efektifitas berkaitan dengan pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu pada sumber daya yang diperlukan

untuk mencapai tujuan tersebut”. Berkaitan dengan pernyataan Arens dan Lorlbecke, efektivitas dapat diartikan sebagai penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan atau sasaran tertentu.

4. Menurut Supriyono, efektivitas dapat diartikan sebagai hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan yang ingin dicapai. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian tujuan tersebut, maka unit tersebut dapat dikatakan semakin efektif.
5. Gibson dkk. menyajikan pemahaman tentang efektivitas dengan mengadopsi perspektif sistem. Metode ini memperhitungkan (1) siklus input-proses-output yang lengkap, bukan hanya output, dan (2) interaksi timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.
6. Menurut Cambel J.P., penilaian efikasi yang paling signifikan dan tersebar luas adalah:
 - a. keberhasilan program
 - b. keberhasilan sasaran
 - c. Tingkat kepuasan dengan program;
 - d. Tingkat masukan dan keluaran;
 - e. Pencapaian tujuan proyek secara keseluruhan.

Secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan agar efektivitas program dapat terlaksana dengan

kemampuan operasional dalam menjalankan program kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Hani Handoko, efektivitas dapat diartikan sebagai keterkaitan antara produksi dan tujuan. Semakin besar kontribusi (kontribusi) output terhadap pencapaian tujuan, semakin sukses organisasi, program, atau kegiatan tersebut. Penekanan efektivitas adalah pada hasil, atau hasil, dari suatu program atau kegiatan. Suatu program atau kegiatan dianggap efektif jika output yang dihasilkannya memenuhi tujuan yang telah diantisipasi.

Tidak mengherankan jika banyak pendapat yang saling bertentangan tentang bagaimana meningkatkan, bagaimana mengatur, dan bahkan bagaimana menentukan indikator efektivitas, sehingga akan semakin sulit untuk menentukan bagaimana mengevaluasi efektivitas. Mengingat keragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi keefektifan, tidak mengherankan bahwa ada banyak cara berbeda untuk mengevaluasi keefektifan.

Karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan akhir dari proses pembangunan, maka dari berbagai uraian tersebut dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan pengertian efektivitas menurut para ahli tersebut bahwa efektivitas dapat diartikan sebagai sejauh mana dengan adanya suatu program tertentu menghasilkan perbaikan kondisi kesejahteraan manusia. Dalam menentukan tingkat kesejahteraan, hal ini juga dapat dilakukan dengan menilai sejumlah indikator yang berbeda, seperti

pendapatan seseorang, tingkat pendidikan, atau perasaan aman yang diperoleh seseorang dari menjalin hubungan.

Dari beberapa sudut pandang dan teori efektivitas yang telah dikemukakan selama ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mengukur efektifitas suatu tindakan atau tindakan secara akurat perlu memperhatikan beberapa indikator, yaitu :

1. Pemahaman program.
2. Tepat Sasaran.
3. Selalu datang tepat waktu.
4. Pencapaian tujuan.
5. Perubahan asli.

Penjelasan mengenai efektivitas di atas membawa berkesimpulan bahwa kata “efektivitas” sinonim dengan “mencapai tujuan”, dan lebih khusus lagi, dengan “mengukur” dalam arti mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Padahal penurunan sampah secara keseluruhan menjadi motivasi utama keputusan pemerintah untuk menerapkan peraturan yang akan membatasi penggunaan kantong plastik.

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik (kantong plastik berbayar) berhasil atau tidak dalam mengurangi jumlah kantong plastik yang digunakan. Efisiensi ini didasarkan pada lima indikator: 1)

pemahaman tentang program; 2) tepat sasaran; 3) tepat waktu; 4) memiliki tujuan tercapai; dan 5) mengalami perubahan nyata.

Menurut Bungkees (2013), konsep efektivitas dapat dilihat sebagai evaluasi yang dilakukan sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat kinerja mereka selaras dengan tingkat kinerja yang diantisipasi untuk mereka, semakin berhasil mereka dievaluasi. Menurut Ravianto (2014:11), konsep efektivitas mengacu pada seberapa baik pekerjaan dilakukan, serta sejauh mana orang menghasilkan output sesuai dengan pekerjaan yang dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dari segi waktu, biaya, dan kualitas, sehingga dapat dikatakan efektif. Dengan kata lain, efektivitas mengacu pada seberapa baik pekerjaan memenuhi tujuan yang dimaksudkan.

Orang mungkin mengatakan bahwa tindakan atau hasil tertentu efektif jika memenuhi serangkaian kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Pelaksanaan semua tugas utama, realisasi tujuan, kepatuhan terhadap tenggat waktu, dan adanya upaya atau keterlibatan aktif dari orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas ini berhubungan langsung dengan tingkat efektivitas.

Dalam arti luas, kemanjuran sesuatu dapat dievaluasi menurut standar atau kriteria berikut:

- a. Sejauh mana seorang individu atau organisasi berhasil menyelesaikan semua tanggung jawab utama yang telah

ditugaskan kepadanya.

- b. Produktivitas, yang mengacu pada jumlah barang atau jasa mendasar yang diciptakan oleh individu, kelompok, atau organisasi.
- c. Efisiensi, yang mengacu pada ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dievaluasi berdasarkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh tujuan (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah dicapai oleh manajemen. Target ini, yang telah ditetapkan sebelumnya, menjadi dasar pengukuran efektivitas. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai derajat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang dilaksanakan dengan baik dan efektif, semakin efektif suatu kegiatan dianggap.

2.2.2. Pengertian Kinerja

Menurut dalam Mahmudi (2005), Yang dimaksud dengan “kinerja” adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pelaksanaan pekerjaan, termasuk juga hasil yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Menurut Rogers yang dikutip dalam Mahmudin (2005:6), kinerja diartikan sebagai hasil kerja itu sendiri. Ini karena hasil pekerjaan memberikan kaitan yang kuat dengan tujuan strategis

organisasi, serta kepuasan pelanggan dan kontribusi ekonomi organisasi.

Menurut Widodo (2008:79), kinerja pada hakekatnya terikat pada tugas individu atau organisasi dalam melaksanakan apa yang menjadi wewenang dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Pernyataan Widodo dapat ditemukan di sini. Kinerja seseorang dapat didefinisikan sebagai tindakan melaksanakan tugas dan meningkatkannya sejalan dengan kewajiban mereka dan hasil yang diharapkan. Dari definisi yang telah dikemukakan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: kinerja adalah pencapaian atau hasil kerja suatu organisasi atau instansi dalam jangka waktu tertentu. Yang dinilai berdasarkan kinerja tersebut adalah sejauh mana organisasi atau instansi tersebut melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan, atau kesesuaian pelaksanaan tugas organisasi atau instansi dengan visi dan misi yang diembannya.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja diartikan sebagai hasil kerja yang telah dilakukan oleh seseorang dalam suatu usaha atau organisasi agar tujuan perusahaan atau organisasi dapat terwujud dan kerugian dapat diminimalisir. . Dengan kata lain, kita dapat menganggap kinerja sebagai keinginan orang atau kelompok orang untuk melaksanakan kewajibannya dan menyelesaikannya sesuai dengan tanggung jawab yang diharapkan.

2.2.3. Pengertian Fakir Miskin

Menurut Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2013, Ada dua istilah yang sangat dikenal berkaitan dengan kemiskinan, yaitu fakir dan miskin. Kedua istilah ini yang kemudian menjadi fokus pembahasan penulis dalam menentukan kriteria kemiskinan. Sedangkan dari bahasa aslinya, yakni bahasa Arab kata *miskin* diambil dari kata “*sakana*” yang berarti diam atau tenang, sedangkan kata *masakin* ialah bentuk jama” dari *miskin* yang menurut bahasa diambil dari kata *sakana* yang artinya menjadi diam atau tidak bergerak karena lemah fisik atau sikap yang sabar dan qana”ah. Istilah "tulang punggung" adalah arti asli dari kata "faqara," dari mana kata "faqir" berasal. Faqir adalah orang yang tulang punggungnya patah, dalam artian beban yang dipikulnya cukup berat untuk mematahkan tulang punggung seseorang jika dipikul cukup lama.

Menurut Tom Gorman (2009: 184), Orang dianggap miskin ketika mereka tidak memiliki cara untuk mencari nafkah bagi diri mereka sendiri atau keluarga mereka dan tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang paling mendasar. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, dan penerapannya berkaitan dengan pengelolaan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Implementasi strategi ini akan menghasilkan masyarakat menerima pemberdayaan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai

kebutuhan dasar hidup mereka. Persyaratan keberadaan mencakup hal-hal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan kesehatan yang memadai, pendidikan, pekerjaan yang menguntungkan, dan/atau akses ke layanan sosial.

Lembaga pengelola zakat memiliki tanggung jawab untuk menyadari bahwa ada orang miskin dan membutuhkan yang mampu dan kuat untuk berusaha, dan ada juga orang miskin dan membutuhkan yang tidak lagi dapat melakukan bisnis karena usia, penyakit, atau faktor lainnya. . Uang hasil zakat dapat diberikan kepada fakir dan miskin yang masih mampu melakukan usaha dalam bentuk distribusi produktif. Misalnya, pemberian modal usaha yang dapat digunakan untuk memperoleh peralatan dan fasilitas bagi badan usaha, merupakan contoh distribusi produktif. Sebaliknya, jika mereka yang miskin dan tidak mampu lagi berusaha, maka distribusi yang disebut distribusi konsumtif akan lebih cocok bagi mereka. Saya berharap uang tunai yang disalurkan melalui zakat dapat membuat hidup sedikit lebih mudah.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang miskin tidak mampu memenuhi syarat untuk kualitas hidup yang baik. Hal ini terjadi karena dua alasan: pertama, mereka tidak memiliki aset dan mata pencaharian yang diperlukan untuk menghidupi diri mereka sendiri, dan kedua, aset dan mata pencaharian yang mereka miliki tidak memadai.

2.2.4. Efektifitas Penanganan Fakir Miskin menurut Undang-Undang 1945

Terkait Dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Fakir Miskin bahwa penanganan fakir miskin dilakukan oleh Menteri Sosial secara terencana, terukur, dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan sendiri. -potensi pembangunan, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial, karena hak-hak yang dapat diperoleh kaum miskin ditentukan, khususnya:

1. Memperoleh pangan, sandang, dan perumahan yang cukup.
2. Memenuhi kebutuhan pengembangan potensi diri.
3. Memenuhi kebutuhan pengembangan potensi diri
4. Dapatkan layanan yang berkaitan dengan kesehatan Anda.
5. Berinvestasi dalam pendidikannya agar ia dapat maju secara lebih bermartabat.
6. Memperoleh perlindungan sosial untuk membangun, memajukan, dan memerdekakan diri dan keluarganya sesuai dengan ciri budaya masyarakatnya.
7. Memperoleh pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial untuk membangun, mengembangkan, dan mengembangkan diri dan keluarganya.
8. Mencapai kualitas hidup yang dapat diterima.
9. Menciptakan suasana hidup yang kondusif untuk kesehatan

yang baik.

Kemudian dalam perlakuan terhadap fakir miskin diatur dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang fakir miskin yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlakuan terhadap fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, bantuan, dan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kehidupan yang layak bagi setiap warga negara. Dengan kata lain, perlakuan terhadap fakir miskin mengacu pada upaya yang terkoordinasi, terkoordinasi, dan terpadu.

2.2.5. Peran Pemerintah

Pengertian Peran merupakan komponen dari unsur kedudukan subjek hukum atau disebut juga manusia dalam proses menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya memainkan peran. Dalam masyarakat, hubungan sosial adalah ikatan koordinasi antara orang-orang yang telah ditentukan oleh norma-norma yang berlaku dan disepakati bersama (Soejono, 2009:210).

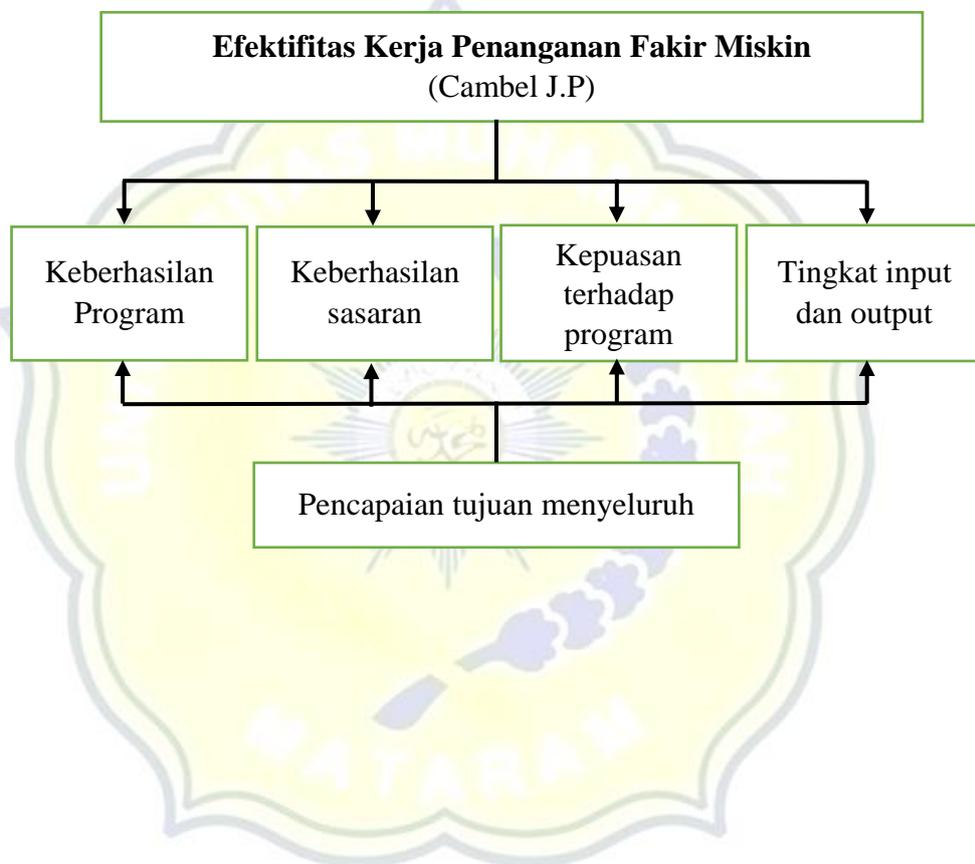
- a. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kedudukan manusia dalam masyarakat merupakan bagian dari peranannya. Suatu fungsi yang menyampaikan makna seperangkat pedoman yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam kehidupan sosialnya.

- b. Suatu fungsi atau sistem yang akan dijalankan oleh orang-orang dalam suatu komunitas atau organisasi disebut sebagai peran.
- c. Definisi tambahan dari peran adalah tingkah laku individu dalam konteks struktur sosial masyarakat.
- d. Peran normatif adalah fungsi yang dilakukan oleh individu atau entitas kelembagaan dan didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku di masyarakat. Peran normatif dapat berupa formal atau informal.
- e. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh individu atau lembaga dan didasarkan pada nilai-nilai konsep atau apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam sistem. Definisi peran ini mungkin berbeda tergantung pada konteksnya.
- f. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh orang atau lembaga dan didasarkan pada fakta nyata di lapangan atau kehidupan sosial yang benar-benar terjadi. Peran ini dapat dibedakan dari peran fiktif karena didasarkan pada peristiwa nyata.

Menurut Aris (2020), pemerintah adalah suatu organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan dalam ranah tertentu, dan istilah “pemerintah” berasal dari kata “ketertiban”. Di dalam pemerintahan terdapat dua partai yang terkandung, dan kedua partai tersebut merupakan satu

kesatuan yang erat yang memiliki hubungan kepartaian. Mereka yang berada di posisi kekuasaan memiliki otoritas, dan mereka yang berada di posisi kepatuhan memiliki kepatuhan..

2.3.Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Menurut Taylor (2011:12) dalam menganalisa data penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, karena berupa data yang merupakan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berisi fakta-fakta yang diperoleh langsung dari informan di lapangan, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam proses analisis datanya. Hal ini disebabkan karena data yang diperoleh di lapangan berupa data. Pendekatan penelitian yang dikenal dengan metode kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku yang disaksikan.

Sangat penting untuk memiliki teknik penelitian yang harus relevan antara satu komponen dengan komponen lainnya untuk memenuhi kebutuhan akan data yang benar yang diperoleh melalui penelitian, yang menuntut strategi yang dapat diterima. Penulis penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, yang bertujuan untuk menemukan atau mencirikan realitas dari peristiwa yang sedang diselidiki. Metode ini memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif (Umar, 2011: 22).

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan khususnya dikantor Dinas Sosial Kabupaten Dompu. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis dapat

memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini. Waktu penelitian ini dimulai pertengahan bulan Mei sampai bulan Juli 2022.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Menurut Sugiyono (2011), Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri pada sumber aslinya, tanpa perantara. Data primer juga dapat dianggap sebagai data berupa kata-kata vokal atau lisan, gerak tubuh, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dipercaya. Jenis data ini dapat dikumpulkan dari orang yang dapat dipercaya. Informasi yang penulis terima dari lapangan merupakan informasi yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara di tempat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek atau responden adalah Efikasi Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Dompu.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber yang tidak mengirimkan data ke pengumpul data secara langsung. Data sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang tidak diambil dari sumber aslinya atau tidak diambil dari sumber pertama, sedangkan maksud penulis adalah referensi atau kajian pustaka pendukung dari judul karya ilmiah yang akan diteliti

dan juga penunjang dalam penulisan. proposal, dan data yang diambil dari sumber kedua, ketiga, dan ketiga, antara lain. Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain buku, jurnal, artikel, berbagai bentuk media massa, penelusuran internet, dan pencatatan pribadi.

3. Sumber Data/Informan

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data penelitian ini terdiri dari, manusia atau narasumber, situasi atau peristiwa, dan dokumentasi.

Sumber data/informan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pemerintah (1 orang)
- b. Kepala Kantor Dinas Sosial (1orang)
- c. Kepala Bagian Penanganan Fakir Miskin (1 orang)
- d. Masyarakat/Fakir Miskin (10 orang)

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data-data secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

1. Observasi

Dalam observasi ini, penulis berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari individu yang sedang diamati atau dimanfaatkan sebagai sumber data untuk dipelajari. Menurut Hartinis Yamin (2009:79), saat melakukan observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dilakukan

individu, memperhatikan apa yang mereka katakan, dan mengambil bagian dalam aktivitas yang mereka lakukan.

Pemanfaatan strategi observasi ini karena strategi observasi ini didasarkan pada pengalaman langsung. Kedua, karena metode observasi memungkinkan Anda untuk melihat dan menganalisis perilaku Anda sendiri, serta mencatat tindakan dan kejadian orang lain sebagaimana yang sebenarnya terjadi. Ketiga, metode penelitian yang mencakup observasi memungkinkan peneliti merekam kejadian dalam konteks yang terkait langsung dengan pengetahuan ahli atau langsung diturunkan dari data. Keempat, menghilangkan potensi prasangka yang terkadang muncul selama proses wawancara. Kelima, penggunaan metode observasi memberikan peneliti kemampuan untuk memahami skenario yang rumit.

2. Wawancara

Menurut Syamsudin (2009), wawancara adalah pertemuan dua individu dengan tujuan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab untuk mengembangkan makna mengenai suatu pokok bahasan tertentu. Percakapan antara dua orang—pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan orang yang diwawancarai (orang yang diwawancarai) adalah cara lain untuk memikirkan wawancara (yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan). Jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara semi terstruktur yang pelaksanaannya lebih

terbuka. Wawancara yang terstruktur, dengan kata lain, peneliti atau pengumpul data mengetahui dengan tepat informasi apa yang akan dikumpulkan dari orang yang diwawancarai

3.5. Teknik Analisis Data

Mengorganisir data, mengkategorikannya menjadi unit-unit, mensintesiskannya, menggabungkannya menjadi pola, memilih mana yang penting dan akan diselidiki, dan menggambar temuan yang dapat dibagikan kepada orang lain adalah langkah-langkah yang terlibat dalam proses analisis data. Tindakan mencari dan menggabungkan data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan kesimpulannya dapat disampaikan kepada orang lain disebut analisis data.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan prosedur pemilihan, dengan penekanan utama pada penyederhanaan dan konversi data mentah yang muncul dari catatan tertulis yang dikumpulkan di lapangan. Karena proses pengumpulan data dimulai dengan kegiatan seperti pembuatan rangkuman, pengkodean, penelusuran tema, pembuatan cluster, penulisan memorandum, dan sebagainya, reduksi dilakukan setelah kegiatan tersebut dengan tujuan menyisihkan data atau informasi yang tidak penting. Saat Anda mengurangi jumlah data yang Anda miliki, Anda diminta untuk meringkasnya, memilih aspek yang paling signifikan, dan berkonsentrasi pada aspek tersebut. Karena pengurangan

jumlah data, gambar akan lebih jelas, dan akan lebih mudah bagi penulis untuk melakukan lebih banyak pengumpulan data dan mencarinya jika diperlukan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan membuat catatan lapangan dan melakukan wawancara. Setelah itu, data dirangkum dan dipetik sedemikian rupa sehingga memberikan gambaran yang jelas kepada penulis.

2. Penyajian Data

Untuk menyajiakan data dalam penelitian kualitatif adalah data teks naratif. Dengan menunjukkan data, penulis akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan pekerjaan masa depan berdasarkan apa yang telah dipahami. Data tersebut tidak hanya dapat ditampilkan dalam bentuk prosa naratif, tetapi juga dalam bentuk grafik, matriks, dan jaringan. Informasi yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dan online, serta melalui sumber tertulis dan perpustakaan. Penulis menggunakan prosa naratif dalam karya sastra ini.

3. Kesimpulan

Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah kesimpulan, serta konfirmasi. Kesimpulan awal yang telah ditarik masih bersifat sementara, dan akan direvisi jika bukti substansial untuk mendukung langkah pengumpulan data selanjutnya tidak ditemukan. Dalam penulisan kualitatif, kesimpulan selalu merupakan penemuan baru yang belum pernah dibuat sebelumnya. Temuan penelitian mungkin berbentuk deskripsi atau deskripsi tentang suatu hal yang sebelumnya

ambigu tetapi sekarang menjadi jelas sebagai hasil penyelidikan. Penulis menarik kesimpulan dari ketiga teknik analisis data di atas: ketiga prosedur tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi yang akan penulis lakukan setelah mendapatkan semua data melalui wawancara dan catatan lapangan.

